

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kemiskinan

Secara etimologis kemiskinan ini berasal dari kata “miskin” yang memiliki arti sebuah kondisi serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda. Kemiskinan adalah sebuah situasi yang serba terbatas yang mana situasi ini bukan merupakan keinginan maupun kehendak penduduk yang mengalaminya. Sebuah penduduk dapat dikatakan miskin apabila tingkat pendidikan, tingkat produktivitas kerja, tingkat pendapatan, kesehatan serta gizi dan tingkat kesejahteraan hidup yang dimiliki oleh penduduk tersebut menunjukkan sebuah ketidakberdayaan atas penduduk itu sendiri. Keadaan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti keterbatasan atas sumber daya manusia yang dimiliki dari segi pendidikan nonformal maupun formal sehingga dinilai pendidikan informal dari penduduk tersebut memiliki tingkat yang rendah pula (Supriatna, 1997).

Selanjutnya dalam BPS (2021) dijelaskan bahwa penduduk miskin merupakan sebuah penduduk dengan rata-rata pengeluaran perkapita dalam setiap bulannya yang berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan ini dipandang sebagai ketidakberdayaan sebuah penduduk dalam sisi ekonomi untuk melakukan belanja kebutuhan dasar seperti makanan maupun bukan makanan.

2.2 Ekonomi Regional

2.2.1 Ekonomi Regional Sebagai Cabang Ilmu Ekonomi

Suatu ilmu dapat diakui sebagai ilmu lain yang berdiri sendiri apabila ilmu tersebut mampu memberikan konsep teori, analisa empirik, dan metodologi yang jelas berbeda dibandingkan dengan ilmu lainnya (Sjafrizal, 2008). Berbeda dengan ilmu ekonomi tradisional, ekonomi regional melibatkan unsur spasial atau tata ruang di dalam analisisnya. Unsur tata ruang ini membuat konsep ekonomi regional digunakan sebagai dasar untuk menentukan perencanaan tata ruang dan kota.

Ekonomi regional dapat diakui sebagai cabang dari ilmu ekonomi dikarenakan ekonomi regional ini menggunakan teori dasar yang sama dengan teori ekonomi secara mikro maupun makro, namun dalam ekonomi regional ini menggabungkan teori ekonomi tersebut dengan teori lokasi. Menurut Leahy (1970), kombinasi dari teori ini disebut sebagai *Spatial Economic Theory*, yaitu suatu cabang dari teori ekonomi yang melibatkan unsur ruang (*Space*) secara aktual di dalam analisisnya, sehingga dalam hal ini ekonomi regional dinilai memberikan perluasan dalam Analisa teori ekonomi mikro maupun makro yang bersifat tradisional. Dengan demikian, analisa dalam ekonomi regional ini banyak menggunakan kerangka berfikir dan teori ekonomi dasar sebagai landasannya.

2.2.2 Pengertian Ekonomi Regional

Dubey (1964) memberikan definisi terhadap ilmu ekonomi regional secara luas dan lengkap. Menurutnya, ilmu ekonomi regional adalah sebuah studi dari sudut pandang ekonomi tentang diferensiasi dan keterkaitan wilayah di alam semesta yang tidak merata dan mobilitas yang tidak sempurna, dengan penekanan

khusus dalam aplikasi dari perencanaan biaya investasi sosial untuk memitigasi permasalahan sosial yang muncul akibat dari keadaan yang ada. Dalam hal ini, dapat diketahui bahwasanya ilmu ekonomi regional cenderung lebih menekankan analisisnya terhadap pemecahan masalah tentang ekonomi regional dari pada di sisi pengembangan ilmu ekonomi secara murni yang pada dasarnya bersifat konsepsional dan teoritis.

Menurut Sjafrizal (2008), setiap daerah memiliki potensi dan kondisi serta karakteristik yang berbeda sehingga perlu kebijakan ekonomi yang berbeda untuk masing-masing daerah guna mendorong dan mengembangkan potensi yang ada dari daerahnya masing-masing yang sesuai dengan potensi, kondisi, serta karakteristik dari daerah tersebut. Ekonomi regional sendiri memiliki tujuan untuk memahami bagaimana *sub-national economies* bekerja serta berinteraksi, apa saja pengaruh yang ditimbulkan terhadap barang dan jasa, manusia, arus uang atau modal, dan lain sebagainya. Beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah menurut analisis ekonomi antara lain adalah perpindahan barang serta arus uang atau modal yang terjadi antarwilayah, berkembangnya area perkotaan atau *urban area*, keberagaman aktivitas ekonomi dalam suatu daerah, dan perpindahan konsumen beserta pekerja yang terjadi antarwilayah (Warsito, 2020)

2.3 PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Dalam kanal resminya, BPS (2008) memaparkan bahwa PDRB merupakan jumlah atas nilai tambah yang dihasilkan keseluruhan dari unit usaha di dalam sebuah daerah atau jumlah atas nilai dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan

keseluruhan unit ekonomi di dalam sebuah daerah. PDRB ini juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai atau menentukan kondisi ekonomi dari sebuah daerah dalam periode tertentu dengan menggunakan dasar harga berlaku maupun harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku ini merupakan nilai tambah dari barang dan jasa dengan menggunakan harga pada tahun berjalan untuk perhitungannya, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar. Arifin (2020) Menjelaskan terdapat tiga pendekatan dalam melakukan perhitungan PDRB, yaitu:

- 1) Pendekatan Produksi (*Production Approach*), merupakan jumlah nilai tambah dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam satu wilayah daerah dalam satu periode tertentu umumnya satu tahun. Unit produksi yang dimaksud terdiri dari 17 unit, antara lain:
 - a. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;
 - b. Pertambangan dan Penggalian;
 - c. Industri Pengolahan;
 - d. Pengadaan Listrik dan Gas;
 - e. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang;
 - f. Konstruksi;
 - g. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
 - h. Transportasi dan Pergudangan;
 - i. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
 - j. Informasi dan Komunikasi;

- k. Jasa Keuangan dan Asuransi;
 - l. Real Estat;
 - m. Jasa Perusahaan;
 - n. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
 - o. Jasa Pendidikan;
 - p. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
 - q. Jasa Lainnya.
- 2) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*), yang melakukan perhitungan PDRB menggunakan pengeluaran/penggunaan yang dikelompokkan menjadi enam komponen, yaitu sebagai berikut:
- a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, yang meliputi semua pengeluaran dalam sebuah rumah tangga yang digunakan untuk belanja barang dan jasa dikurangi dengan penjualan bersih barang bekas atau sisa oleh sebuah rumah tangga dalam jangka waktu satu tahun.
 - b. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, yang meliputi pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan dan belanja barang baik belanja pemerintah pusat maupun daerah yang tidak termasuk dengan penerimaan produksi barang serta jasa. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah realisasi dadi APBD.
 - c. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto, yang meliputi pembuatan serta pembelian atas barang modal baik baru maupun bekas dari luar maupun dari dalam negeri namun tidak termasuk dengan penerimaan

produksi barang dan jasa dengan menggunakan metode pendekatan arus barang.

- d. Perubahan Inventori, yang merupakan perubahan atas stok yang dihitung dari PDRB hasil penjumlahan dari nilai tambah bruto sectoral lalu dikurangi dengan komponen permintaan akhir lainnya.
 - e. Ekspor Barang dan Jasa, yang merupakan ekspor barang yang perhitungan nilainya dilakukan menggunakan *fee on board* (FOB).
 - f. Impor Barang dan Jasa, yang merupakan impor barang yang perhitungan nilainya dilakukan menggunakan *cost insurance freight* (CIF).
- 3) Pendekatan Pendapatan (*Earning Approach*), yang melakukan perhitungan PDRB dengan menggunakan jumlah dari balas jasa yang diterima oleh masing-masing faktor produksi dalam suatu daerah selama jangka waktu tertentu yang umumnya satu tahun.

2.4 Sektor Ekonomi Unggulan

Sektor unggulan dalam suatu daerah dinilai sebagai motor untuk perkembangan sektor-sektor lain dalam suatu daerah sehingga perannya sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Dalam bukunya, Adisasmita (2013) menyatakan bahwa sektor unggulan mempunyai potensi tinggi untuk diproduksi secara massal dengan menggunakan biaya produksi yang rendah, dengan begitu maka produk dapat dijual dengan harga yang rendah pula sehingga produk yang dihasilkan memiliki daya saing yang kuat di dalam pasar yang lebih luas. Terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyusun rencana pembangunan salah satunya adalah berdasarkan atas potensi pengembangan serta

peluang yang ada serta dapat dimanfaatkan. Beberapa potensi tersebut adalah sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki daerah, modal, dan teknologi.

Perlu kesesuaian antara perencanaan pembangunan daerah dengan potensi sektor unggulan yang dimiliki untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan berdasarkan potensi sektor unggulan sehingga tujuan perencanaan dapat tercapai dengan baik. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dipaparkan Arsyad (1999) tentang pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien yaitu pembangunan ekonomi daerah ini harus memperhatikan potensi dan karakteristik dari daerah itu sendiri. Perbedaan karakteristik dari masing-masing daerah ini menyebabkan perbedaan pola kebijakan yang perlu diterapkan dalam masing-masing daerah pula. Maka dari itu, perlu adanya penyusunan strategi yang telah dikaji secara mendalam untuk melakukan perencanaan pembangunan ekonomi dalam suatu daerah. Usya (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri dari sektor yang memiliki keunggulan, antara lain:

- 1) Sektor yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi melebihi sektor-sektor lain;
- 2) Sektor yang memiliki tingkat distribusi yang relatif besar;
- 3) Sektor yang memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang;
- 4) Sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi melebihi sektor-sektor lain.

Sejalan dengan yang dipaparkan oleh Rachbini (2001) terkait syarat agar suatu sektor layak untuk ditetapkan sebagai sektor prioritas, yaitu:

- 1) Sektor harus menghasilkan produk dengan permintaan yang besar sehingga laju pertumbuhan akan berkembang dengan cepat;
- 2) Produksi dengan pengembangan kapasitas yang lebih besar karena adanya perubahan teknologi yang dapat diadopsi secara kreatif;
- 3) Investasi yang meningkat atas hasil produksi yang ditetapkan sebagai prioritas baik dari swasta maupun pemerintah;
- 4) Sektor tersebut harus mampu memberi pengaruh kepada sektor-sektor lain dalam suatu daerah tersebut.

2.5 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Riyadi dan Bratakusumah (2005) memaparkan bahwa metode *Location Quotient* (LQ) ini digunakan untuk melakukan perbandingan kemampuan masing-masing sektor ekonomi di dalam suatu wilayah dengan kemampuan sektor ekonomi di wilayah yang lebih besar atau luas jangkauannya. Terdapat beberapa variabel untuk perhitungan dalam analisis *Location Quotient* ini, contohnya adalah nilai tambah yaitu terkait dengan tingkat pendapatan serta jumlah lapangan kerja yang tersedia. Muljarijadi (2011) juga memaparkan bahwa analisis *Location Quotient* ini berguna untuk menentukan apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau nonbasis. Analisis ini merupakan metode statistik yang menggunakan acuan atau dasar output atau nilai tambah guna melakukan analisis lalu menentukan keanekaragaman dari sektor ekonomi basis dari masyarakat wilayah atau lokal. Konsep perthitungan analisis ini adalah dengan menggunakan rumus

$$LQ = \frac{\frac{E_{ir}}{E_r}}{\frac{E_{in}}{E_n}} = \frac{\frac{Y_{ir}}{Y_r}}{\frac{Y_{in}}{Y_n}}$$

Dengan :

LQ = *Location Quotient*

E = Jumlah tenaga kerja

Y = Jumlah output atau PDB atau PDRB atau pendapatan

I = Sektor tertentu

r = Kota atau daerah tertentu

n = Daerah yang lebih luas seperti dalam cakupan provinsi atau nasional

Atas perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus LQ maka dapat ditentukan apakah sebuah sektor merupakan sektor basis atau nonbasis. Apabila hasil $LQ > 1$ maka peranan sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor basis di dalam wilayah tersebut karena sektor tersebut dinilai lebih menonjol atau dominan dibandingkan dengan sektor lain dalam wilayah tersebut dan produk dari sektor ini seringkali diekspor ke daerah lain. Apabila hasil $LQ < 1$ maka sebaliknya, sektor tersebut dapat dikatakan sebagai sektor nonbasis dikarenakan sektor tersebut dinilai memiliki peranan yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan sektor sektor lain di dalam wilayah tersebut dan produk dari sektor ini cenderung dikonsumsi oleh masyarakat di dalam daerah tersebut.

2.6 Analisis *Shift-Share*

Analisis *Shift-Share* merupakan sebuah analisis yang berfungsi untuk membandingkan produktivitas perekonomian sebuah daerah dengan daerah lain yang mempunyai skala lebih besar (Negara & Putri, 2020). Sejalan dengan

pendapat Daryanto dan Hafizrianda (2010) yang mengatakan bahwa analisis *Shift-Share* ini berfungsi untuk membandingkan perubahan kegiatan ekonomi suatu daerah dengan perubahan kegiatan ekonomi dari daerah lainnya. Dalam penggunaan analisis *Shift-Share* ini diterapkan asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi pada awal perhitungan adalah setara atau sama. Hasil perhitungan menggunakan analisis ini menunjukkan perubahan nilai dari kegiatan ekonomi yang dikelompokkan ke dalam komponen pertumbuhan yaitu:

- 1) Komponen Pertumbuhan Regional;

$$PR_{ij} = (R_a)Y_{ij}$$

Dengan :

PR_{ij} = Komponen pertumbuhan regional dari sektor i dalam daerah studi

R_a = Rasio Produk Domestik Bruto daerah referensi

Y_{ij} = Produk Domestik Bruto daerah studi pada tahun dasar.

- 2) Komponen Pertumbuhan Proporsional;

$$PP_{ij} = (R_i - R_a)Y_{ij}$$

Dengan :

PP_{ij} = Komponen pertumbuhan regional dari sektor i dalam daerah studi

R_a = Rasio Produk Domestik Bruto daerah referensi

R_i = Rasio Produk Domestik Bruto dari sektor i dalam daerah referensi

Y_{ij} = Produk Domestik Bruto dari sektor i dalam daerah studi pada tahun dasar.

- 3) Komponen Pertumbuhan Pangsa Wilayah.

$$PPW_{ij} = (r_i - R_i)Y_{ij}$$

Dengan :

PPW_{ij} = Komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW) dari sektor i dalam daerah studi

r_i = Rasio Produk Domestik Bruto dari sektor i dalam daerah studi

R_i = Rasio Produk Domestik Bruto dari sektor i dalam daerah referensi

Y_{ij} = Produk Domestik Bruto dari sektor i dalam daerah studi pada tahun berjalan.

Analisis ini kemudian akan menghasilkan nilai Pergeseran Bersih atau biasa disebut dengan PB, yaitu penjumlahan dari Pertumbuhan Proporsional dengan Pertumbuhan Pangsa Wilayah. Dalam analisis *Shift-Share*, nilai PB ini digunakan sebagai acuan. Nilai PB yang positif menunjukkan bahwa sektor progresif, artinya sektor tersebut merupakan sektor yang maju apabila dibandingkan dengan sektor lain yang dibandingkan, sehingga perkembangan sektor tersebut dinilai akan lebih baik di masa depan apabila dibandingkan dengan sektor lain yang dibandingkan. Sebaliknya, apabila nilai PB adalah negatif maka sektor daerah tersebut merupakan sektor yang tidak lebih maju apabila dibandingkan dengan sektor lainnya dalam suatu daerah yang digunakan sebagai pembanding dan sektor tersebut dinilai tidak akan memiliki perkembangan yang baik di masa yang akan datang.

2.7 Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Yusuf (1999) menjelaskan bahwa Model Rasio Pertumbuhan atau biasa disebut dengan MRP merupakan sebuah analisis yang melakukan perbandingan

antara pertumbuhan suatu kegiatan yang memiliki skala lebih luas dengan kegiatan lain yang memiliki skala lebih kecil. Dalam menghitung MRP terdapat dua rasio perbandingan yaitu rasio pertumbuhan daerah referensi (RPr) dan rasio pertumbuhan daerah studi (RPs). Apabila nilai RPs positif maka pertumbuhan daerah studi dinilai lebih tinggi atau lebih dominan daripada daerah referensi atau pembanding. Sebaliknya, apabila nilai RPs negatif maka pertumbuhan daerah studi dinilai lebih rendah atau lebih kecil apabila dibandingkan dengan daerah referensi atau pembanding. Untuk melakukan penghitungan menggunakan MRP dengan metode RPs dapat dengan rumus :

$$RPs = \frac{\Delta E_{ij}}{E_{ij(t)}} / \frac{\Delta E_{ir}}{E_{ir(t)}}$$

Dengan :

RPS = Rasio pertumbuhan daerah studi

ΔE_{ir} = Perubahan nilai PDRB sektor tertentu di daerah referensi pada awal tahun pengamatan (t) dan akhir tahun pengamatan $(t+n)$

ΔE_{ij} = Perubahan nilai PDRB sektor tertentu di daerah studi pada awal tahun pengamatan (t) dan akhir tahun pengamatan $(t+n)$

$E_{ir(t)}$ = Nilai PDRB sektor tertentu pada awal tahun pengamatan daerah referensi

$E_{ij(t)}$ = Nilai PDRB sektor tertentu pada awal tahun pengamatan daerah studi.

Berbeda dengan RPs, RPr membandingkan laju pertumbuhan PDRB dari sektor tertentu yang ada di daerah referensi atau pembanding dengan pertumbuhan PDRB dari sektor studi. Dalam hal ini apabila RPr bernilai positif maka dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan PDRB sektor tertentu yang ada di daerah

referensi atau pembanding lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan total PDRB daerah studi. Sebaliknya, apabila RPr bernilai negatif maka dapat diartikan bahwa laju pertumbuhan PDRB sektor tertentu yang ada di daerah referensi atau pembanding lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan total PDRB daerah studi. Untuk melakukan penghitungan dengan analisis MRP dengan metode RPr maka dapat menggunakan rumus :

$$RPr = \frac{\Delta E_{ir}}{E_{ir(t)}} / \frac{\Delta E_r}{E_r(t)}$$

Dengan :

RPr = Rasio pertumbuhan daerah referensi atau pembanding

ΔE_{ir} = Perubahan nilai atas PDRB sektor tertentu di daerah referensi pada awal tahun pengamatan (t) dan akhir tahun pengamatan $(t+n)$

ΔE_r = Perubahan nilai atas PDRB di daerah referensi atau pembanding pada awal tahun pengamatan dan akhir tahun pengamatan $(t+n)$

$E_{ir(t)}$ = Nilai PDRB sektor tertentu pada awal tahun pengamatan daerah referensi

$E_r(t)$ = Nilai PDRB total PDRB pada awal tahun pengamatan daerah referensi.

atas perhitungan menggunakan analisis Model Rasio Pertumbuhan ini kemudian akan diperoleh kombinasi nilai dari RPs dan RPr yang memiliki artian sesuai dengan nilai dari RPs dan RPr itu sendiri apakah bernilai positif ataupun negatif.

2.8 Analisis Overlay

Analisis *Overlay* adalah “sebuah teknik yang dapat digunakan untuk menentukan kesimpulan atas beberapa hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya” (Adiyatin, Satyahadewi, & Perdana, 2019, p. 6). Beberapa analisis tersebut adalah analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share*, dan Model Rasio Pertumbuhan (MRP). Hasil dari beberapa analisis tersebut kemudian dipadukan untuk menentukan apakah suatu sektor dalam kegiatan ekonomi suatu daerah bersifat progresif, memiliki pertumbuhan yang dominan, serta memiliki surplus atau sebaliknya. Analisis ini juga dilakukan guna mengetahui tingkat kontribusi suatu sektor terhadap tingkat PDRB pada suatu daerah tertentu. Suatu sektor dapat dikatakan memiliki kontribusi yang dominan terhadap PDRB suatu daerah jika hasil perhitungan dari beberapa analisis yang telah dilakukan memberikan nilai positif. Adapun hasil penghitungan analisis yang digunakan untuk analisis *Overlay* ini adalah hasil penghitungan dari nilai LQ, besaran nilai PB dalam analisis *Shift-Share*, dan nilai RPs dalam analisis MRP yang telah dilakukan sebelumnya.

Selanjutnya dalam penelitian ini sebuah sektor disebut sebagai sektor unggulan jika:

- 1) Merupakan sektor basis ($LQ > 1$)
- 2) Merupakan sektor progresif ($PB > 0$)
- 3) Merupakan sektor dengan pertumbuhan tinggi ($RPs > 1$)

2.9 Analisis Korelasi Karl Pearson

Koefisien korelasi merupakan sebuah nilai berbentuk angka yang mewakili lemah atau kuatnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk mencari nilai

korelasi antara sektor unggulan dengan tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Jawa Timur, digunakan persamaan koefisien korelasi *product moment*. Koefisien korelasi *product moment* sendiri merupakan sebuah teknik korelasi yang berfungsi untuk mencari hubungan antar variabel (Sugiyono, 2017). Untuk menentukan nilai korelasi ini dapat digunakan rumus

$$r = \frac{n\sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{(n\sum x^2 - (\sum x)^2)(n\sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Dengan:

r = nilai korelasi

n = Jumlah atau banyaknya pasangan variabel X dan Y

X = nilai dari variabel X

Y = nilai dari variabel Y

Dengan menggunakan rumus korelasi tersebut, digunakan nilai *Location Quotient* dari sektor pertanian masing-masing kabupaten dan kota tahun 2010 sampai dengan 2019 sebagai variabel X, dan nilai indeks kedalaman kemiskinan tiap-tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur dari tahun 2010 sampai dengan 2019 sebagai variabel Y. Hasil dari analisis korelasi ini yang akan digunakan untuk menentukan apakah hubungan sektor unggulan dari tiap-tiap kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat kemiskinannya atau bahkan tidak memiliki hubungan sama sekali.